



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BARA SULIAWANTORO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGUNGKAPAN I**
3. NHK : **105015**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **15.400.600.000**

1. Tanah Seluas 501 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 400.800.000
2. Tanah Seluas 4585 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
3.668.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/650 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, WARISAN Rp. 7.111.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
5. Tanah Seluas 3604 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 720.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **585.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOBIL, VW GOLF 1.4 TSI Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000
3. MOBIL, MAZDA CX30 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **250.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **124.777.023**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 16.360.377.023

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 16.360.377.023

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.